

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, bahkan mendapat apresiasi dari dunia internasional karena mendapat peringkat ke 3 sebagai negara yang tahan terhadap krisis moneter 2008 (Setiawan, 2015). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5-6 persen.

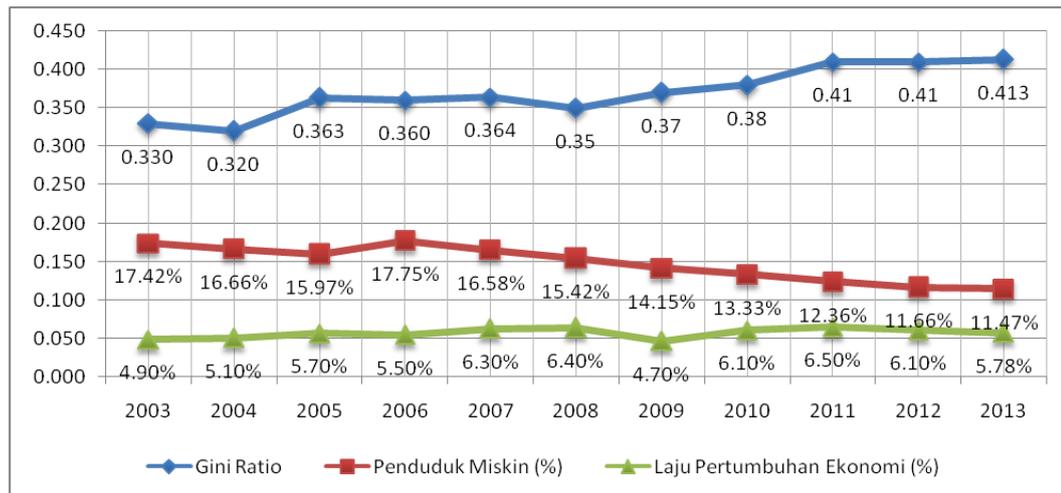
Setiawan (2015) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sejatinya merupakan pertumbuhan yang mampu menciptakan pengentasan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi ini justru diikuti dengan meningkatnya kondisi pengangguran dan kemiskinan. Sebagaimana salah satu tujuan dari *Millenium Development Goal* (MDG) bahwa pada tahun 2015 penduduk miskin di dunia pada umumnya dan Indonesia berkurang menjadi setengahnya (Sanjaya, 2014). Namun demikian fakta yang ada menunjukkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan tahun 2013 masih belum seperti yang diharapkan.

Laju pertumbuhan perekonomian Indonesia terus meningkat dari 4,9 persen pada tahun 2003 menjadi lebih dari 5,7 persen pada tahun 2013. Selain pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, perubahan angka kemiskinan yang

ditunjukkan oleh besarnya tingkat penduduk miskin di Indonesia juga menunjukkan hal yang positif. Sepanjang tahun 2003 sampai dengan 2013 persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang dari 17,42 persen menjadi 11,47 persen (BPS, 2015), namun demikian terlihat bahwa laju pengurangan angka kemiskinan semakin melambat.

Sementara itu pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tinggi. Angka rasio Gini pada tahun 2012 mencapai 0,410 dan meningkat menjadi 0,413 pada tahun 2013, angka ini merupakan angka yang cukup tinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Kedua fakta diatas menunjukkan adanya sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih terkait dengan proses dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dalam hal ekonomi masih rendah.

Fenomena melambatnya laju pengurangan jumlah penduduk miskin salah satunya dikarenakan adanya faktor internal berupa kenaikan harga BBM pada tahun 2005 yang memberikan tekanan cukup tinggi bagi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Demikian juga halnya kelompok masyarakat yang berada tepat atau sedikit di atas garis kemiskinan. Selain itu inflasi tinggi yang terjadi selama rentang waktu Maret-April 2013 dan mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat miskin (Sanjaya, 2014).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

GAMBAR 1.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia tahun 2003-2013

Menurut Wibowo (2014) dalam Setiawan (2015) bahwa salah satu penyebab kurangnya kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang sangat rendah. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tingkat literasi keuangan masyarakat Malaysia mencapai 66 persen, Singapura mencapai 98 persen, sedangkan Thailand mencapai angka 73 persen, sementara Indonesia masih pada angka 28 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya literasi keuangan tersebut adalah kondisi geografis Indonesia yang pada umumnya merupakan daerah kepulauan dan sekitar 60 persen masyarakat berada pada daerah pedesaan sehingga menghambat akses terhadap layanan jasa keuangan.

Untuk mengatasi keterbatasan akses layanan jasa keuangan tersebut, maka muncul suatu program perluasan akses layanan keuangan yang disebut dengan

keuangan inklusif. Keuangan inklusif mempromosikan akses dan penggunaan layanan keuangan berkualitas tinggi secara global, khususnya di antara orang-orang miskin (Steelyana, 2013).

Pentingnya keuangan inklusif yang berdasarkan atas prinsip pemerataan dan pertumbuhan harus menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan, untuk itu keuangan inklusif sangat dibutuhkan dalam proses pengentasan kemiskinan (Sanjaya, 2014). Keuangan inklusif menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Forum internasional seperti G20, APEC, AFI, OECD, dan ASEAN secara intensif melakukan pembahasan mengenai keuangan inklusif. Selain itu keuangan inklusif juga telah menjadi prioritas dari pada pemerintah Indonesia. Pada bulan juli 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden-Tim Nasional Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dimana strategi ini berisi kerangka kerja, implementasi dan langkah kedepan pelaksanaan keuangan inklusif. Program ini dibentuk untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, strategi keuangan inklusif dijabarkan kedalam 6 pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen. Salah satu tujuan dari strategi tersebut adalah menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan

pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama kelompok miskin dan menengah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.

Hasil penelitian Sanjaya (2014) menjelaskan bahwa keuangan inklusi di Indonesia dapat dikategorikan rendah. Menurut Ummah (2015) rata-rata indeks keuangan inklusif antar provinsi di Indonesia berkisar antara 0,1-0,33 kecuali provinsi Jakarta yang tergolong tinggi yang mencapai 0,8. Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam tingkat inklusi rendah bersama dengan 31 provinsi lainnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat miskin belum sepenuhnya bersentuhan dengan sektor keuangan formal atau partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap jasa keuangan formal. Hal ini dapat dilihat dari tiga sisi yaitu aksesabilitas, ketersediaan dan penggunaan jasa perbankan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meyimpang dari yang diharapkan maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data yang digunakan untuk menganalisis keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu berdasarkan hasil perhitungan dari dimensi penetrasi, ketersediaan dan penggunaan jasa perbankan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya indeks keuangan inklusif sangatlah beragam, dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada faktor produk domestik regional bruto (PDRB), angka melek huruf serta rasio jalan dengan tahun perhitungan 2004-2013.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tingkat Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimanakah pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimanakah pengaruh Rasio Jalan terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan indeks keuangan inklusif di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Namun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

1. Mengetahui tingkat Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Mengetahui pengaruh Rasio Jalan terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan keuangan inklusif dan memberikan gambaran terkait keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tinjauan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan, pemerataan distribusi pendapatan maupun peluang/kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sebagai implikasi dari keuangan inklusif.

3. Manfaat bagi penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memperoleh kesempatan untuk lebih mendalami dan memperluas pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusifitas keuangan disuatu daerah.